

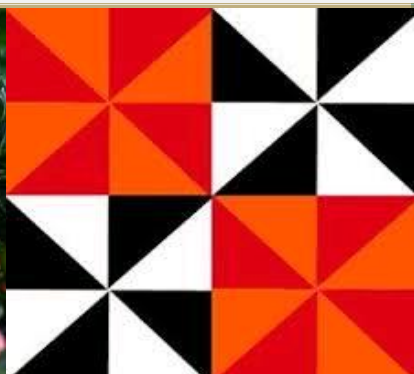
LAMPUNG BARAT



**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
JULI TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen rencana daerah yang mana terdapat penyesuaian – penyesuaian dengan keadaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan sehingga berperan vital dalam mengarahkan program kegiatan serta subkegiatan pelayanan Perangkat Daerah satu tahun kedepan. Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat rencana pelayanan baik kepada masyarakat maupun pada sesama Perangkat Daerah lainnya yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan adanya perubahan terhadap agenda pembangunan yang lebih mengedepankan pada pencapaian kesejahteraan dan pemerintahan yang berdayasaing, maka untuk menghadapi tantangan dan perubahan di tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan strategi sebagai upaya pencapaian sasaran telah merumuskan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023 kedalam 5 (Lima) Program dengan sumberdana berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

Melalui Penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini diharapkan sasaran Perangkat Daerah akan tercapai.

Liwa , Juli 2023  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DAMAN NASIR., M.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680701 198901 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II .....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	12
BAB IV PENUTUP .....	14

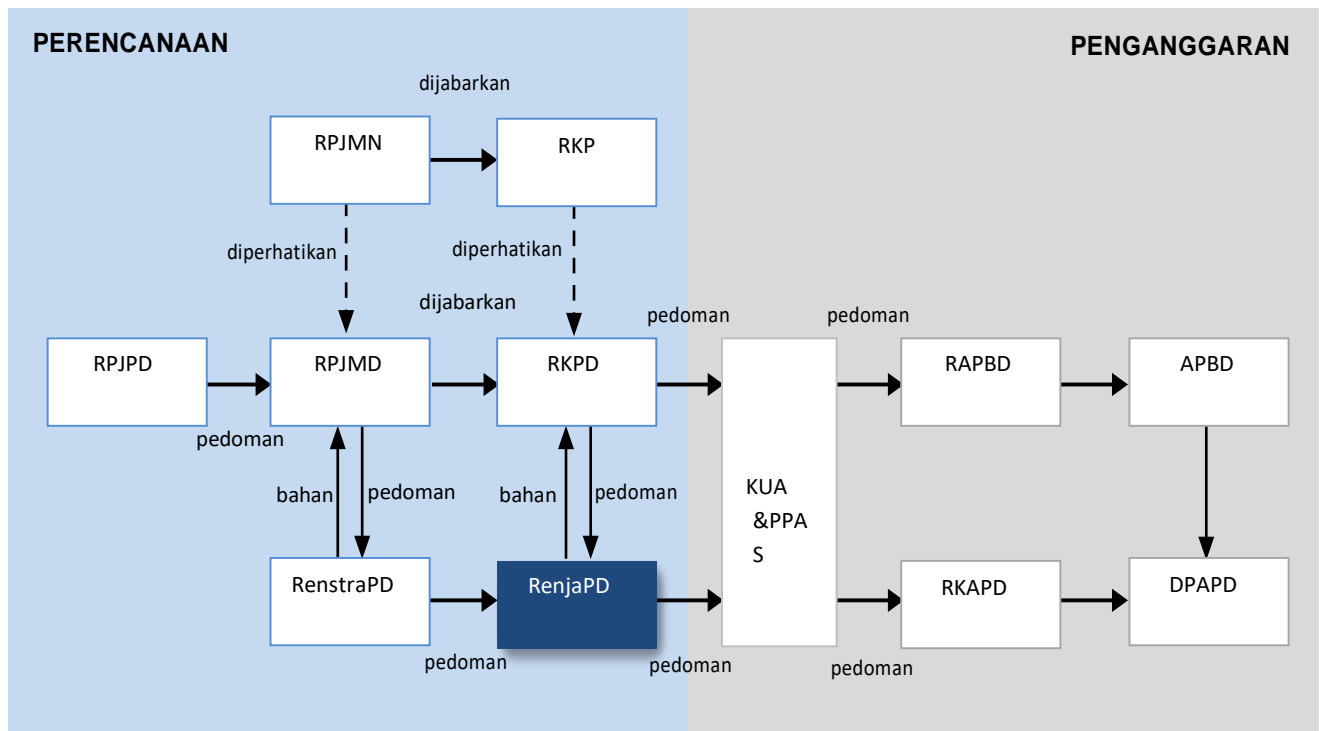
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat(11) yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ininantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



**Gambar1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Adanya kondisi luar biasa yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat **Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dilandasi oleh beberapa aturan hukum yang mengatur keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang pedoman nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
  13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
  14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
  15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2010;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2018 Tentang RPJMD 2017 – 2023;
  19. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat secara berkesinambungan.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan aktifitas di Kabupaten Lampung Barat, sehingga terwujud sinergitas antar pelaku dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.4 Dasar Pertimbangan**

Dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan adalah sebagai berikut.

1. Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;
2. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sehingga terjadi pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran;

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, meliputi :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan.

### **2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

### **3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

### **4. BAB IV PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

### **5. LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat hubungannya dengan proses evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi dapat mengidentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi itu sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan triwulan II.
- Memperhatikan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat dengan indicator Jumlah Investasi PMDN/PMA Rp. 95 Milyar
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu B ( 79 Point )

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 ( Lima ) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 ( Dua Belas ) kegiatan serta 32 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja sebesar Rp. 3.309.566.950,- setelah pergeseran Rp. 3.074.112.452,- terealisasi sebesar Rp. 1.289.172.135,- atau 41,94 persen.

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 20 subkegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen pada triwulan II yaitu :

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi fisik / output sebesar 6 Dokumen dari target 11 Dokumen (50%) persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD realisasi fisik / output sebesar 1 Dokumen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
5. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
6. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas (Laporan disusun diakhir tahun);
7. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
8. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas

9. Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
10. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
11. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
12. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
13. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan operasional atau lapangan realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
14. Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi fisik / output output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
15. Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Subkegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas;
17. Subkegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 18 Survei Perizinan dari target 30 Survei Perizinan Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan anggaran kas.
18. Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / kota realisasi fisik / output 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas;
19. Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 150 Pelaku Usaha Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal sesuai dengan anggaran kas;

20. Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik realisasifisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dituangkan dalam Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan OPD yang menanganinya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD Pergeseran / Perubahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023.

Adapun rincian Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2023 sebesar Rp. 5.888.142.800,-
2. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 3.309.566.950,-
3. Jumlah anggaran yang bertambah akibat akibat refocusing tahun 2023 sebesar Rp. –
4. Jumlah anggaran yang berkurang akibat pergeseran tahun 2023 sebesar Rp. 235.454.498,-
5. Jumlah subkegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat pergeseran tahun 2023 sebanyak : 0 Sub Kegiatan ( Perubahan target indicator dari jumlah 2 event menjadi 1 event )
6. Jumlah subkegiatan yang baru muncul akibat refocusing tahun 2023 sebanyak 0 subkegiatan

7. Jumlah subkegiatan yang direncanakan ditunda pelaksanaannya pada Perubahan APBD tahun 2023 sebanyak 0 subkegiatan
8. Jumlah subkegiatan yang baru muncul pada perubahan APBD tahun 2023 sebanyak 0 kegiatan



## BAB IV

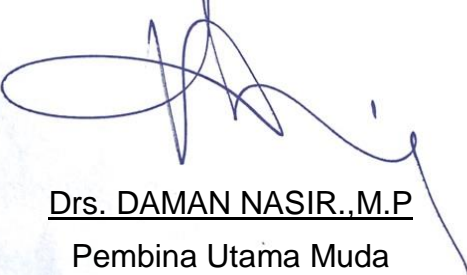
### P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat 2023–2026 dalam menunjang tercapainya target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

Demikian perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Liwa , Juli 2023  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DAMAN NASIR., M.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680701 198901 1 002

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I**  
**EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**  
Kabupaten Lampung Barat

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Target Kinerja DPA Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023				
										Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1				2	3	4		5		6		7		8=7/6	9=5+7		10=9/4
2	18	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,25	Point	Point	78,80	Point	82,61	Point	104,84%	82,61	Point	104%	
2	18	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	38	Dokumen	Dokumen	11	Dokumen	6	Dokumen	54,55%	6	Dokumen	16%	
					Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah	20	Dokumen	Dokumen	5	Dokumen	2	Dokumen	40,00%	2	Dokumen	10%	
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	48	Laporan	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	13%	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	38	Dokumen	Dokumen	11	Dokumen	6	Dokumen	54,55%	6	Dokumen	16%
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	25%
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	25%
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0	Dokumen	0%
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0	Dokumen	0%
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4	Laporan	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00%	0	Laporan	0%
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	48	Laporan	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	13%
					Jumlah orang yang menerim gaji dan tunjangan ASN	29	Orang	Orang	24	Orang	21	Orang	87,50%	21	Orang	72%	

						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	4	Laporan	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00%	0	Laporan	0%
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD	4	Laporan	Laporan	17	Laporan	8	Laporan	47,06%	8	Laporan	200%
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	25%
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29	Orang	Orang	24	Orang	21	Orang	87,50%	21	Orang	72%
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	Laporan	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00%	0	Laporan	0%
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD dan laporan hasil	4	Laporan	Laporan	17	Laporan	8	Laporan	47,06%	8	Laporan	200%
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	25%
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	25%
2	18	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	25%
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	25%
2	18	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	25%
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	Paket	2	Paket	1	Paket	50,00%	1	Paket	25%

						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	Paket		Paket	2	Paket	1	Paket	50,00%	1	Paket	13%
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5	Dokumen		Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	5	Dokumen	100%
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket		Paket	2	Paket	1	Paket	50,00%	1	Paket	25%
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	Paket		Paket	2	Paket	1	Paket	50,00%	1	Paket	13%
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5	Dokumen		Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	5	Dokumen	100%
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	36	Unit		Unit	2	Unit	2	Unit	100,00%	2	Unit	6%
2	18	1	2.07	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	36	Unit		Unit	2	Unit	2	Unit	100,00%	2	Unit	6%
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%

2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	16	Laporan		Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	6	Laporan	38%
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11	Unit		Unit	11	Unit	6	Unit	54,55%	6	Unit	55%
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9	Unit			10	Unit	4		40,00%	4		44%
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	Unit			1	Unit	0		0,00%	0		0%
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11	Unit		Unit	11	Unit	6	Unit	54,55%	6	Unit	55%
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9	Unit		Unit	10	Unit	4	Unit	40,00%	4	Unit	44%
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	Unit		Unit	1	Unit	0	Unit	0,00%	0	Unit	0%
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	80	%		%	10	%	10	%	100,00%	10	%	13%

2	18	3	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0	Dokumen	0%
2	18	3	2.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0	Dokumen	0%
2	18	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit sesuai dengan standar layanan	100	%	%	100	%	100	%	100,00%	100	%	100%
2	18	4	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non prizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	1.775	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	400	Pelaku Usaha	2915	Pelaku Usaha	728,75%	2.915	Pelaku Usaha	164%
2	18	4	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	270	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	30	Kegiatan Usaha	18	Kegiatan Usaha	60,00%	18	Kegiatan Usaha	7%
2	18	4	2.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non prizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	1.775	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	400	Pelaku Usaha	2915	Pelaku Usaha	728,75%	2.915	Pelaku Usaha	164%
2	18	4	2.01	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	270	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	30	Kegiatan Usaha	18	Kegiatan Usaha	60,00%	18	Kegiatan Usaha	7%
2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	100	%	%	75	%	75	%	100,00%	75	%	75%

2	18	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	840	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	180	Pelaku Usaha	150	Pelaku Usaha	83,33%	150	Pelaku Usaha	18%
					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	57	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	11	Kegiatan Usaha	3	Kegiatan Usaha	27,27%	3	Kegiatan Usaha	5%
2	18	5	2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	840	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	180	Pelaku Usaha	150	Pelaku Usaha	83,33%	150	Pelaku Usaha	18%
2	18	5	2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	57	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	11	Kegiatan Usaha	3	Kegiatan Usaha	27,27%	3	Kegiatan Usaha	5%
2	18	6		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase layanan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media</b>	100	%	%	100	%	100	%	100,00%	100	%	100%
2	18	6	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0	Dokumen	0%
2	18	6	2.01	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	4	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0	Dokumen	0%
													77,95%			39%



**LAMPIRAN II**  
**Perubahan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023														Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Target		Pagu Indikatif				Alasan Perubahan (Dibanding APBD Murni)		Lokasi		Sumber Dana		Prioritas			Kelompok Sasaran							
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja Murni	APBD Murni	APBD Pegerasan	Perubahan Renja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nasional	Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Target	Pagu Indikatif						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.888.521.800	3.309.566.950	3.074.112.452	3.259.456.252															7.076.483.946	
2	18	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPPTSP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPPTSP	78,80 %	78,80 %	3.055.774.800	2.412.316.650	2.155.992.152	2.203.071.152															78,80 %	4.133.820.846
2	18	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	25.690.400	18.183.000	18.183.000	33.247.000															5 Dokumen	33.886.656
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen																			11 Dokumen	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan																			12 Laporan	
2	18	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	4.346.000	4.346.000	4.346.000	19.410.000	Pelaksanaan Kurjungan Kerja Perencanaan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	Aparatur	Aparatur	11 Dokumen	4.705.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2	18	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.848.100	1.848.100	1.848.100	1.848.100		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	2.661.266	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2	18	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	2.607.840	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2	18	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.627.300	1.627.300	1.627.300	1.627.300		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	2.343.312	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2	18	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	2.276.640	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

2	18	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.969.600	1.969.600	1.969.600	1.969.600	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	1 Laporan	2.836.224	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12.507.400	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	16.455.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.514.125.500	2.054.944.200	1.849.378.602	1.849.378.602									1 Dokumen	3.325.085.636	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan													1 Laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	17 Laporan	17 Laporan													17 Laporan		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen													24 Orang		
2	18	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.505.810.500	2.046.629.200	1.841.063.602	1.841.063.602	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	24 Orang/bulan	3.313.934.386	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	1 Laporan	3.306.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	17 Laporan	17 Laporan	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	17 Laporan	5.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	2.645.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.921.000	6.941.000	6.941.000	6.941.000									1 Dokumen	10.200.000	
2	18	001	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.921.000	6.941.000	6.941.000	6.941.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	10.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	18	001	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	0 Orang	24.199.900	4.199.900	4.199.900	4.199.900							4 Orang	25.700.000				
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen											1 Dokumen					
2	18	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	4.199.900	4.199.900	4.199.900	4.199.900		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0 Orang	20.000.000	-	-	-				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	4 Orang	20.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	136.068.000	76.251.100	69.117.200	101.132.200										5 Dokumen	178.627.275	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket															12 Laporan	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen															12 Laporan	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan															2 Paket	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan															2 Paket	
2	18	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Paket	2 Paket	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	2 Paket	2.689.965	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Paket	2 Paket	22.905.000	16.033.400	16.033.400	16.033.400		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	2 Paket	39.399.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	5 Dokumen	6.427.350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5.316.000	5.316.000	5.316.000	5.316.000		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	6.713.010	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	18	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.933.000	47.987.700	40.853.800	72.868.800	Pagu anggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk mengakomodir jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	S. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	123.397.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	37.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000										0 Unit	69.700.000	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit														0 Unit		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit														6 Unit		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit														0 Unit		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit														0 Unit		
2	18	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	37.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	S. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	5 Unit	69.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	159.195.000	127.450.200	127.450.200	127.450.200										4 Laporan	234.109.064	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan														4 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan														4 Laporan		
2	18	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000		Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	S. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	1.831.662	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22.560.000	22.560.000	22.560.000	22.560.000		Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	S. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	33.398.300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.010.000	103.265.200	103.265.200	103.265.200		Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	S. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	198.879.102	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	18	001	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	149.875.000	120.747.250	77.122.250	77.122.250							2 Unit	256.512.215				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit											11 Unit					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	10 Unit											9 Unit					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit											2 Unit					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit											1 Unit					
2	18	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	106.860.000	103.350.000	59.725.000	59.725.000		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	Aparatur	Aparatur	11 Unit	166.069.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	10 Unit	10.237.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	Aparatur	Aparatur	13 Unit	15.693.015	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	32.778.000	10.237.250	10.237.250	10.237.250		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	Aparatur	Aparatur	1 Unit	74.750.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	002			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan iklim Penanaman Modal	20 %	0%	300.000.000	-	-	-									20 %	-	-	
2	18	002	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0 Kegiatan usaha	0 Kegiatan usaha	300.000.000	-	-	-										0 Kegiatan usaha	-	-
						Jumlah Peraturan Kepala daerah/ Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Kepala daerah/ Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0 Dokumen														1 Dokumen		
2	18	002	2.01	001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000	-	-	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor- sektor Ekonomi Potensial	Masyarakat, Calon Investor dan Investor	Masyarakat, Calon Investor dan Investor	1 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	003			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Minat Investasi	Persentase Peningkatan Minat Investasi	10 %	10 %	1.550.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000										10 %	1.980.000.000	
2	18	003	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000										1 Dokumen	1.980.000.000	
						Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0 Dokumen														0 Dokumen		

2	18	003	2.01	002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Masyarakat, Investor dan calon investor	Masyarakat, Calon Investor dan Investor	2 Dokumen	1.980.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	004			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	100%	586.625.000	95.850.300	95.850.300	234.115.100								100,00 %	508.066.400		
2	18	004	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha	55 Kegiatan Usaha	586.625.000	95.850.300	95.850.300	234.115.100									60 Kegiatan Usaha	508.066.400	
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	0 Orang													20 Orang		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha													400 Pelaku Usaha		
						Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha													0 Kegiatan Usaha		
2	18	004	2.01	001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	487.090.000	62.265.300	62.265.300	178.905.100			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Masyarakat	Masyarakat	400 Pelaku Usaha	398.599.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	004	2.01	002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha	55 Kegiatan Usaha	73.585.000	33.585.000	33.585.000	55.210.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Masyarakat	Masyarakat	60 Kegiatan Usaha	80.921.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	004	2.01	003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	0 Orang	25.950.000	-	-	-			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan stabil	Masyarakat	Masyarakat	20 Orang	28.545.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	005			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00 %	75,00 %	326.122.000	417.400.000	438.270.000	438.270.000									75,00 %	380.596.700	
2	18	005	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	"Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal"	"Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal"	8 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	326.122.000	417.400.000	438.270.000	438.270.000									8 Kegiatan Usaha	380.596.700	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha	11 Kegiatan Usaha													13 Kegiatan Usaha		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha													210 Pelaku Usaha		

2	18	005	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha	48.114.000	52.724.000	-	-	-	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Masyarakat dan Pelaku Usaha	Masyarakat dan Pelaku Usaha	8 Kegiatan Usaha.	53.130.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	005	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	216.878.000	303.546.000	408.812.000	408.812.000	-	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum & DAK Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Masyarakat dan Pelaku Usaha	Masyarakat dan Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	238.504.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	005	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha	11 Kegiatan Usaha	61.130.000	61.130.000	29.458.000	29.458.000	-	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum & DAK Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Masyarakat dan Pelaku Usaha	Masyarakat dan Pelaku Usaha	13 Kegiatan Usaha	88.962.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	006			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTP	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTP	100 %	100 %	70.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	-									100 %	74.000.000	
2	18	006	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	-									1 Dokumen	74.000.000	
2	18	006	2.01	001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Masyarakat, investor dan calon investor	Masyarakat, investor dan calon investor	1 Dokumen	74.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>TOTAL</b>									<b>5.888.521.800</b>	<b>3.309.566.950</b>	<b>3.074.112.452</b>	<b>3.259.456.252</b>	<b>-</b>										<b>7.076.483.946</b>		